

Laporan Dari Malaysia

Blusukan ke Perkebunan Sawit, Menlu Ingin Pastikan Perlindungan TKI

Bahsar Rifa'i - detikNews



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat berbincang-bincang dengan para TKI yang bekerja di Ladang Basir Ismail milik Kulim (Malaysia) Berhad. (Bahsar Rifa'i/detik.com)

Johor - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan prioritas pemerintah untuk perlindungan TKI yang bekerja di Malaysia. TKI juga diminta proaktif berkomunikasi dengan pihak KJRI bila menemui permasalahan.

"Kalau bicara mengenai perlindungan WNI, ini salah satu prioritas pemerintah. Keberadaan Bapak-ibu di luar negeri dilindungi. Kita berusaha melakukan yang terbaik. Karena itu, saya tidak segan ke ladang, ke kilang (pabrik), agar Bapak tidak berkurangnya hak-haknya," kata Retno di hadapan ratusan pekerja perkebunan sawit Kulim (Malaysia Berhad), Johor, Malaysia, Kamis (16/3/2017).

Di perusahaan kelapa sawit Kulim seluas 55.802 hektare ini, ada 4.171 pekerja TKI, di mana 121 orang di antaranya adalah perempuan. Para TKI ini kebanyakan datang dari daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok dan Sumbawa.



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan para TKI yang bekerja di Ladang Basir Ismail milik Kulim (Malaysia) Berhad. (Bahsar Rifa'i/detik.com)

Pemerintah, kata Menlu Retno, akan memastikan perlindungan dan keselamatan begitu TKI datang ke Malaysia. Jika terjadi masalah, pemerintah akan ikut bertanggung jawab.

"Mudah-mudahan tidak ada masalah. Di sini ada KJRI, kalau ada apa-apa, kontak Konsulat Jenderal untuk mendapatkan bantuan," tuturnya.

Retno juga meminta para TKI bekerja dengan mengetahui hak dan kewajiban. Selain itu, pekerja Indonesia harus taat aturan hukum, baik dari perusahaan maupun hukum di negara Malaysia.



Foto: Bahsar Rifa'i/detik.com

"Saya berpesan, kita harus menghormati aturan apa pun yang ada di negara tersebut. Aturan perusahaan harus juga diperhatikan. Karena kalau menghormati aturan, kita akan dihormati, Ibu-Bapak duta Indonesia. Kalau berbuat baik, nama Indonesia akan baik," ujarnya.

Pihak perusahaan, sambung Retno, juga ditipi pesan mengenai komitmennya untuk melindungi TKI. Ini dilakukan agar keberadaan TKI, perusahaan, dan pemerintah Malaysia saling memberikan keuntungan.

"Ini hubungan menguntungkan. Tidak boleh ada pihak yang merugikan. Saya yakin Bapak-ibu paham hak dan kewajibannya dan tidak ada hak yang tidak dibayarkan," tutur Retno.

(bri/tdn)